

Terdakwa Kasus “Unlawful Killing” Diminta Jujur Berikan Kesaksian

JAKARTA (IM) - Henry Yosodiningrat yang merupakan kuasa hukum terdakwa Ipd M Yusmin Ohorella, dan Briptu Fikri Ramadhan, meminta kliennya untuk memberi kesaksian yang jujur dalam persidangan.

Yusmin dan Fikri merupakan terdakwa kasus dugaan pembunuhan tanpa proses hukum atau unlawful killing terhadap empat laskar Front Pembela Islam (FPI).

Henry menyebut tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi sidang Rabu (2/2) pekan depan.

“Tidak ada persiapan apa-apa, kami hanya minta kedua terdakwa ini agar memberikan keterangan apa adanya sesuai peristiwa yang terjadi,” sebut Henry, saat ditemui wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (25/1).

Diketahui persidangan mestinya berlangsung padas-

elas (25/1). Namun sekitar pukul 11.00 WIB, hakim anggota Suharno mengumumkan bahwa sidang mesti ditunda. Pasalnya ketua majelis hakim, Arif Nuryanta berhalangan karena mesti mengikuti pelatihan teknis.

Henry menegaskan tidak ingin kliennya memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Sebab selama ini pihaknya selalu berusaha mengali keterangan dari berbagai saksi untuk mendapatkan kebenaran.

“Kami tidak ingin ada keterangan-keterangan palsu,” ucapnya.

Henry ingin kliennya terbuka dalam persidangan untuk menyampaikan semua fakta terkait insiden di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek itu.

“Supaya tidak terjadi salah hukum, (yang) menghukum orang tidak bersalah. Itu namanya peradilan sesat,” tuturnya. ● **han**

KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menerbitkan surat keputusan tentang waktu pemungutan suara Pemilu 2024. DPR, pemerintah, bersama penyelenggara pemilu telah menyepakati tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2022.

“Dalam waktu dekat KPU menerbitkan SK KPU tentang hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu,” ujar anggota KPU I Dewa Raka Sandi saat dihubungi, Selasa (25/1).

Selanjutnya, KPU akan mencermati dan menyempurnakan draf rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan

jadwal Pemilu 2024. Dalam penyusunan PKPU, KPU akan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR.

“Mekanisme pembentukan PKPU memang demikian. Salah satunya konsultasi, lalu dilanjutkan ke proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

Adapun dalam rancangan tahapan Pemilu 2024 yang disusun KPU, tahapan pemilu sudah dimulai pada pertengahan Juni 2022, salah satunya tahapan bimbingan teknis. Kemudian berlanjut awal Agustus 2022 dengan tahapan pendaftaran parpol. Artinya, tinggal sekitar 5 bulan sebelum tahapan pemilu dimulai. ● **mei**

Panglima TNI Andika Instruksikan Jajarannya Efektifkan Serbuan Vaksinasi dengan Persuasif

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal, Andika Perkasa, meminta jajarannya semakin mengefektifkan serbuan vaksinasi Covid-19 agar penanganan pandemi Covid-19 bisa berjalan dengan baik. Kendati demikian, Andika meminta pelaksanaan serbuan vaksinasi Covid-19 tersebut dilakukan secara persuasif tanpa upaya memaksa.

“Dari saya tetap semua dilakukan secara persuasif. Jangan ada yang sifatnya koersif atau memaksa. Sehingga nanti malah enggak nyaman. Kita ingin mendukung capaian vaksinasi pemerintah,” ujar Andika Perkasa, Selasa (25/1) saat Rapat di Mabes TNI seperti yang diunggah akun Instagram Puspenn TNI.

Ia menyebutkan, pihaknya akan mengecek seluruh jajarannya apakah sudah memahami Imendagri Nomor 66 Tahun 2021.

“Oleh karena itu kuasai. Saya akan cek. Saya akan cek random nanti. Bukan sekarang. Mungkin besok atau lusa. Saya akan telepon, saya cek untuk memastikan. Sudah memahami belum, sudah membaca belum. Terima kasih selamat bertugas,” tutur Andika Perkasa.

Jenderal TNI Andika Perkasa didampingi jajaran petinggi TNI memberikan arahan kepada seluruh jajaran TNI, agar mempedomani arahan pemerintah, terkait program serbuan vaksinasi, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2021, tentang pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19.

Dalam kesempatan itu Andika Perkasa menambahkan untuk program serbuan vaksinasi terus dilakukan agar capaian vaksinasi di akhir tahun bisa mencapai target pemerintah. ● **han**

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



APEL GELAR PASUKAN TNI AD JABODETABEK

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kanan) menyanyikan yel-yel bersama prajurit Kopassus dalam Apel Gelar Pasukan Jajaran TNI Angkatan Darat (AD) Wilayah Jabodetabek di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (25/1). Dalam apel tersebut KSAD menekankan tujuh pedoman harian yang harus diterapkan para prajurit TNI AD salah satunya implementasi saptamarga sumpah prajurit dan 8 wajib TNI di mana pun berada.

Perbudakan yang Dilakukan Bupati Langkat Tidak Manusiawi, Harus Ditindak Tegas

Perbuatan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin yang membuat kerangkeng manusia di rumahnya dianggap perbuatan yang sangat jahat.

JAKARTA (IM) - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengancam perbudakan yang dilakukan Bupati Langkat, Sumatera Utara (Sumut), Terbit Rencana Parangin Angin. Kecamatan itu ditulisnya dalam cuitannya di Twitter.

Mantan menteri yang terkenal dengan jargon ‘tenggelamkan’ itu mengutuk keras aksi perbudakan yang dilakukan Terbit tersebut. Menurut dia, penemuan kerangkeng besi

yang berisi puluhan manusia di kediaman Bupati Langkat tidak dapat ditolerir.

“Perbudakan modern adalah hal yang tidak bisa lagi kita tolerir. Saya khawatir itu bukan satu-satunya tempat seperti ini. Keji& tidak berperikemanusiaan,” cuitnya.

Susi menegaskan tindakan yang dilakukan Bupati Langkat itu adalah hal yang tidak berperikemanusiaan. Melalui cuitannya, Susi juga menduga jika penjara berbentuk kerang-

keng besi itu digunakan untuk memperbudak puluhan pekerja sawit. Cuitan ini langsung mendapat berbagai respon dari warganet.

“Masih diduga. Ada yg bilang itu sebenarnya tempat rehabilitasi pengguna narkoba,” cuit @anto_mnf.

Senada dengan Susi, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan, sangat memprihatinkan adanya temuan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat Non Aktif Terbit Rencana Perangin Angin.

“Temuan tentang kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat merupakan persoalan serius, memprihatinkan dan sangat tepat ditindaklanjuti aparat penegak hukum

sesuai aturan yang berlaku,” katanya saat dihubungi, Selasa (25/1).

Anggota Komisi III DPR Habiburrahman menilai, perbuatan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin yang membuat kerangkeng manusia di rumahnya sangat jahat.

Ia pun tidak habis pikir dengan perbuatan Terbit tersebut karena menurutnya perlu ada obsesi yang begitu tinggi untuk membuat kerangkeng di rumahnya sendiri.

“Kok bisa ya, membayangkan saja kita enggak bisa, kok bisa dia membayangkan, merencanakan dan mewujudkan hal tersebut, ini jahalnya enggak ketulungan orang begini ini,” kata Habiburrahman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/1).

Politikus Partai Gerindra itu pun prihatin dengan terkuaknya kasus ini yang menurutnya seolah mengulang apa yang terjadi di zaman kolonial di mana ada seseorang yang punya kewenangan untuk menahan dan memenjarakan orang.

Ia berpendapat, dalih keberadaan kerangkeng sebagai tempat rehabilitasi narkoba juga tidak beralasan karena Terbit tidak memiliki wewenang itu.

“Orang kita saja minta pemakai yang direhabilitasi tidak dipenjara, direhabilitasi, kalau itu kan berbentuk penjara begitu, itu dalihlah,” ujarnya.

Menurutnya, kasus tersebut juga dapat dikenakan Pasal

333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perampasan kemerdekaan.

“Siapa pun pelakunya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang membantu melakukan, yang ikut bersamasama, wajib untuk dihukum dan dimintai pertanggungjawaban, ancaman hukumannya 8 sampai 9 tahun,” kata Habiburrahman.

Diberitakan, Terbit yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi diduga melakukan kejahatan lain berupa perbudakan terhadap puluhan manusia.

Dugaan itu diungkap oleh Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, yang menerima laporan adanya kerangkeng manusia serupa penjara (dengan besi dan gembok) di dalam rumah bupati tersebut.

Di dalam rumah Terbit ada dua sel yang diduga digunakan untuk memenjarakan 40 orang. Dua kerangkeng manusia tersebut berukuran 6,6 meter dan berisi 27 orang. Mereka bekerja di kebun sawit milik Terbit selama 10 jam mulai pukul 08.00 hingga 18.00. Selepas bekerja, mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng, sehingga tak memiliki akses untuk keluar.

Kerangkeng itu terbongkar saat tim Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP) mengeledah rumah politikus Partai Golkar tersebut saat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu. ● **lus**

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Diduga Potong Dana ASN untuk Kepentingan Pribadi

JAKARTA (IM) - Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi (RE) diduga sengaja memotong dana para Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil potongan dana para ASN tersebut diduga digunakan untuk kebutuhan Rahmat Effendi pribadi.

Hal ini terungkap setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP) memeriksa sejumlah pejabat pada Pemkot Bekasi, pada Senin (24/1). Pejabat Pemkot Bekasi yang diperiksa di antaranya Kepala Bapelitbangda bernama Dinar Faisal Badar.

Kemudian, Kasi Tata Pemerintahan bernama Bima, Kasi PTKSD bernama Sugito, Asisten Daerah (Asda) I pada Sekda Kota Bekasi bernama Yudianto, serta Fungsional Analisis Kepegawaian Pemkot Bekasi bernama Haeroni.

Mereka diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi.

“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya iuran berupa pemotongan sejumlah uang dari para ASN Pemkot Bekasi yang kemudian ditampung dan dikelola oleh orang-orang kepercayaan ter-

angka RE (Rahmat Effendi),” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (25/1).

“Diduga uang dimaksud selanjutnya diperuntukkan bagi kebutuhan tersangka RE,” imbuhnya.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelima tersangka yang berstatus sebagai penerima suap yakni, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Bang Pepen.

Kemudian, M Buyamin menjabat sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Mulyadi sebagai Lurah Kati Sari, Wahyudin menjabat Camat Jatiasempurna, serta Jumhana Lutfi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi.

Sementara itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya.

Bang Pepen juga diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. ● **mei**

Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Adapun, sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar. Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar.

Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar, serta proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.

Bang Pepen diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa. Rahmat Effendi disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus ‘Sumbangan Masjid’.

Uang sebesar Rp7,1 miliar tersebut diduga diterima Bang Pepen melalui berbagai pihak perantara. Selain itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya.

Bang Pepen juga diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. ● **mei**

Putrinya Meninggal Dunia, Nurul Arifin: Maura Anak yang Sangat Cantik ...

JAKARTA (IM) - Putri sulung Nurul Arifin, Maura Magnalia Madyaratry, meninggal dunia saat berada di meja makan. Diduga karena terkena serangan jantung.

Kepergian sang anak dalam usia yang begitu muda meninggalkan duka mendalam bagi Nurul dan suaminya Mayong Suryo Laksono. Meski begitu, Nurul dan suami berusaha tegar di hadapan para pelayat dan awak media.

“Kami mengucapkan terima kami buat kehadirannya, ucapan bela sungkawa kepada anak kami tercinta. Kami jelas merasa betul betul kehilangan karena kami punya anak dua. Jadi, sekarang anak kami tinggal satu,” ujar Nurul.

“Namun demikian, apa yang Maura Hadapi sekarang adalah yang terbaik dari Tuhan, bikin hilang semua sakitnya,” lanjutnya.

Mengenang sosok Maura semasa hidup, Nurul menyebutkan bahwa anak sulungnya

itu adalah sosok yang cerdas dan eksentrik. Dia tipe anak yang tak ingin dibatasi dalam berpenampilan.

“Ya kalian pasti tahu, Maura anak yang sangat cantik ya. Sangat pintar, sangat cerdas. Mungkin karena cerdasnya menjadi eksentrik, tentunya ada di seluruh badan. Jadi tidak mau dibatasi dan ada piercing juga,” tuturnya.

Maura Magnalia Madyaratry dinyatakan meninggal dunia karena henti jantung pada Selasa (25/1). Sebelumnya, dia ditemukan tergeletak di ruang makan hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit.

Jenazah Maura bakal dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (26/1), hari ini. Diberangkatkan dari rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. “Besok (Rabu) dimakamin jam 10.00 WIB. Berangkat dari rumah ini ke San Diego Hills,” ujar Nurul, Selasa (25/1). ● **mei**

PT INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK ("Perseroan")

PENGUMUMAN HASIL PENGGABUNGAN USAHA PT BINTANG DELAPAN TERMINAL KE DALAM PT INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK ("Penggabungan Usaha")

Untuk memenuhi Pasal 133 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Direksi PT Indonesia Morowali Industrial Park sebagai perusahaan yang menerima penggabungan usaha, dengan ini mengumumkan hasil penggabungan PT Bintang Delapan Terminal ("BDT") ke dalam Perseroan, sebagai berikut:

- Direksi Perseroan dan BDT telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dalam Hariani International Media dan Media Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2021.
- Penggabungan Usaha ini telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") masing-masing. Perseroan yang dilakukan secara sirkuler pada tanggal 10 Desember 2021 dan BDT yang dilakukan secara sirkuler pada tanggal 10 Desember 2021.
- Perseroan dan BDT telah menandatangani Akta Penggabungan Usaha No. 40 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., S.E., M.KN., Notaris di Jakarta ("Akta Penggabungan") dan Penggabungan Usaha berlaku efektif sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Tanggal Efektif").

Dengan demikian, terhitung sejak Tanggal Efektif:

- Semua aktifitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, karyawan, asset, liabilitas dan ekuitas BDT karena hukum beralih ke Perseroan dan selanjutnya BDT bubar karena hukum tanpa proses likuidasi.
- Susunan Pengurus
 - Direksi:
 - Presiden Direktur : Tuan Wu Huadi
 - Direktur : Tuan Hamid Mina
 - Direktur : Tuan Xiang Guangtong
 - Direktur : Tuan Huang Welfeng
 - Direktur : Tuan Alexander Baru
 - Dewan Komisaris:
 - Presiden Komisaris : Tuan Halim Mina
 - Komisaris : Tuan Wang Haijun
 - Komisaris : Tuan Mikhael
- Susunan Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan			
	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)*	Jumlah Saham	
Modal Dasar	5.376.000.000.000	480.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.357.552.000.000	121.210	
Saham Dalam Portefolio	4.018.448.000.000	358.790	

Susunan Pemegang Saham				
No.	Pemegang Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)*	Jumlah Saham	Persentase
1.	Shanghai Decent Investment (Group) Co., Ltd	748.014.400.000	66.787	55,10%
2.	PT Bintang Delapan Investama	381.057.600.000	34.023	28,07%
3.	PT Sulawesi Mining Investment	228.480.000.000	20.400	16,83%
	Jumlah	1.357.552.000.000	121.210	100,00%

* Nilai Nominal per saham adalah USD 1.000 atau setara dengan Rp 11.200.000

Demikian Pengumuman ini dibuat dan disampaikan agar semua pihak dapat mengetahuinya.

Jakarta, 26 Januari 2022

Direksi
PT Indonesia Morowali Industrial Park



RAKER KOMISI III DENGAN KEPALA BNPT

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja dan capaian target BNPT di tahun 2021 serta roadmap tahun 2022, program prioritas dan strategi dalam capaiannya.

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. SEJAHTERA AMAL ABADI, sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 23, tanggal 24 Januari 2022, dibuat dihadapan FARDIAN, SH., Notaris di Jakarta, Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan:

Menyetujui pembubaran perseroan terbatas PT. SEJAHTERA AMAL ABADI, Berkedudukan di Jakarta Selatan, dan Menunjuk SUWANDHI SASMITA sebagai Likuidator.

Bagi pihak yang berkepentingan termasuk kreditor Perseroan, dapat menghubungi atau mengajukan tagihan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator dengan alamat:

Komplek Wijaya Graha Puri (Grand Wijaya Center)
Blok H 8, Jl. Wijaya II, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Jakarta, 26 Januari 2022
Likuidator
Ttd
SUWANDHI SASMITA

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. WAHANA KERJA BERSAMA, sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 24, tanggal 24 Januari 2022, dibuat dihadapan FARDIAN, SH., Notaris di Jakarta, Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan:

Menyetujui pembubaran perseroan terbatas PT. WAHANA KERJA BERSAMA, Berkedudukan di Jakarta Selatan, dan Menunjuk SUWANDHI SASMITA sebagai Likuidator.

Bagi pihak yang berkepentingan termasuk kreditor Perseroan, dapat menghubungi atau mengajukan tagihan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator dengan alamat:

Komplek Wijaya Graha Puri (Grand Wijaya Center)
Blok H 8, Jl. Wijaya II, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Jakarta, 26 Januari 2022
Likuidator
Ttd
SUWANDHI SASMITA